

**KAJIAN TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH SURAT EDARAN
BAPEPAM NO. 02 TAHUN 2002
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA**

Abdul Rohman

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research are computed the indexes reveal financial report among industries. In addition, giving an suggestion policy to agency which made policy about completing certainty of public firms who reveal financial report in Indonesia. This research pointed on practice of revealing financial report on public firm in Indonesia before prevail the realization about that policy by BAPEPAM on 2002. the method are items identification financial report and arrange indexes reveal financial report between industry for all thirteen industries. The second, identification toward the practice of revealing financial report after turn out the BAPEPAM policy on 2002. The indexes of revealing financial report between industry arrange and then considerate with the research result about the period before BAPEPAM policy turn out to see are there any significant differentiation. Based on the result of t-test showed that are significant different indexes reveal financial report the period before BAPEPAM policy turn with after turn out the BAPEPAM policy on 2002.

Keyword Financial Performance, Ligimiality, Capital Structure and Profitability

1. PENDAHULUAN

Selama ini kajian tentang pengungkapan informasi laporan keuangan secara komprehensif belum banyak dilakukan di Indonesia. Padahal status laporan keuangan perusahaan adalah bersifat wajib untuk diungkapkan (*mandatory disclosure*). Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara empiris mengenai praktek pengungkapan informasi laporan keuangan perusahaan publik yang ada di Indonesia. Hal itu terasa lebih relevan dengan dikeluarkan aturan SE-BAPEPAM mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia baru-baru ini.

Penelitian ini akan dimulai dengan mengungkap jenis informasi yang disajikan didalam laporan keuangan perusahaan publik dengan melalui pendekatan komparasi antar industri dan antar periode dimana aturan tersebut ditetapkan. Selanjutnya dengan melakukan studi komparasi aturan BAPEPAM dengan aturan sejenis di negara lain dalam hal ini USA maka diharapkan dapat diberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan yang dikeluarkan BAPEPAM selama ini.

Perkembangan dunia bisnis yang cepat menuntut adanya penyebaran informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu informasi yang diperlukan adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan

diterbitkan sebagai informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama satu tahun.

Praktek pelaporan keuangan di Indonesia selama ini mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 1994 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kemudian bagi perusahaan yang go publik, pihak BAPEPAM telah mengatur tentang format dan isi laporan keuangan termasuk informasi yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam No.06/PM/2000 dan peraturan VIII.G.7. Aturan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi penting didalam laporan keuangannya yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan di masa mendatang. Informasi tersebut antara lain, perubahan metoda akuntansi, penjabaran kurs valuta asing, laba atau rugi operasi maupun non operasi, dan jenis-jenis informasi kegiatan perusahaan lain baik yang bersifat biasa maupun luar biasa. Keharusan mengungkapkan jenis-jenis informasi oleh BAPEPAM maupun oleh SAK tersebut disebut sebagai "Mandatory Disclosure." *Mandatory Disclosure* ini wajib dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melindungi para investor maupun kreditur dari praktek menyembunyian informasi oleh manajemen perusahaan publik yang sering terjadi di Pasar Modal.

Meskipun pengungkapan laporan keuangan perusahaan bersifat wajib dan mengacu pada prinsip keterbukaan informasi, tetapi dalam praktek pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini cenderung bervariasi. Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis mengenai pedoman penyajian laporan keuangan yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangannya. Akibatnya format penyajian laporan keuangan antar perusahaan menimbulkan keragaman. Oleh karena itu pada akhir-akhir ini BAPEPAM mengeluarkan surat edaran ketua BAPEPAM sebagai tindak lanjut atas regulasi Keputusan Ketua Bapepam No.06/PM/2000. Surat Edaran BAPEPAM No. 02/PM/2002 bertanggal 27 Desember 2002 mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2003. Dengan telah dikeluarkannya pedoman penyajian yang jelas maka diharapkan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan publik menjadi semakin meningkat. Sesuai dengan aturan tersebut terdapat tiga belas pedoman penyajian untuk tiga belas sektor industri yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini akan meneliti tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan publik sebelum dan sesudah dikeluarkannya aturan BAPEPAM dan juga tinjauan tentang aturan itu sendiri. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari rencana penelitian ini yaitu: (a) *secara ekonomis*, penelitian ini akan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang bernilai ekonomis dan empiris. Hasil penelitian yang berupa rekomendasi kebijakan terhadap pedoman penyajian laporan keuangan yang selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi BAPEPAM untuk melakukan penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada selama ini. Disamping itu bagi pihak IAI (selaku badan pembuat standar akuntansi keuangan), hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan prinsip-prinsip pengungkapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat. (b) *secara keilmuan*, peneliti dapat memberi bahan masukan bagi dunia pendidikan untuk mengkaji lebih jauh mengenai teori pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah dibahas dalam literatur dan praktek pengungkapan di Pasar Modal Indonesia.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran tentang item-item pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan publik
2. Indeks pengungkapan laporan keuangan antar industri

3. Gambaran informasi tentang perbedaan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah dikeluarkannya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kaitannya dengan tingkat pengungkapan perusahaan terdapat tiga prinsip pengungkapan yang dapat diterapkan dalam laporan keuangan. Prinsip pengungkapan tersebut adalah “*adequate, fair, dan full*” (Hendriksen dan Breda, 1998). Pengungkapan yang *adequate* adalah pengungkapan yang cukup memberikan informasi kepada pemakai, namun cukup disini mengandung arti adanya keterbatasan (*minimum level*) dalam penyajian informasi sehingga ada kecenderungan penyajian informasi seminimal mungkin asal tidak menyesatkan pemakai. Sedangkan prinsip pengungkapan yang *fair* mengandung tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap guna kepentingan umum dan bukan kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994 yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Prinsip pengungkapan yang *full* memberikan arti penyajian semua informasi yang berguna secara lengkap dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan.

Dari ketiga prinsip pengungkapan di atas, dalam SAK 1994 telah dinyatakan bahwa informasi yang disajikan didalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip *full disclosure*. Demikian pula pihak BAPEPAM sebagai *regulatory body* pasar modal di Indonesia sudah menentukan bahwa semua perusahaan yang telah *go-public* di Indonesia harus menjalankan prinsip *full disclosure* dalam laporan keuangannya.

Dalam hubungannya dengan praktek pengungkapan dan manfaatnya bagi para pemakai laporan keuangan dan pasar modal, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan. Penmann (1988) membagi sifat informasi yang diungkapkan menjadi *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Informasi yang bersifat *mandatory disclosure* merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan karena memang oleh peraturan atau undang-undang informasi tersebut diharuskan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme pengungkapan keuangan secara *full disclosure*, sebenarnya dalam undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 telah diatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Khusus mengenai prinsip transparansi keuangan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi perusahaan diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang meliputi paling tidak laporan keuangan tahunan terakhir yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar nasional.

Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 berusaha lebih memperjelas aturan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang hal-hal apa saja yang harus dirinci oleh perusahaan publik dalam menerbitkan laporan tahunan mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan tahunan harus mencakup ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis dan pembahasan oleh manajemen, penjelasan mengenai investasi/divestasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Perkembangan terakhir dari pengungkapan item *mandatory* dalam laporan keuangan menjadi lebih jelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua BAPEPAM No.02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang berisikan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan

keuangan pada perusahaan publik di Indonesia. Aturan ini dilatarbelakangi hasil survey pada para pengguna laporan keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia masih belum memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi. Kemudian penyajian laporan keuangan antar perusahaan, khususnya dalam industri yang sama dalam prakteknya disajikan dengan format yang bervariasi. Oleh karena itu enam tahun sesudah aturan BAPEPAM baru keluar petunjuk teknis dari penyajian laporan keuangan.

Peran pengungkapan *mandatory item* kepada publik menjadi sangat penting setidaknya didasari pada beberapa alasan sebagai berikut (Bainbridge, 1999):

The Public Goods-based Market Failure.

Dipandang sebagai *public good*, sehingga akses terhadap suatu informasi harus didapatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara mudah. Agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara mudah dan menjangkau khalayak umum, maka harus ada pihak yang menjamin hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi dari pihak pemerintah melalui lembaga kontrol sebagai pengawas dan penjamin penyebaran informasi secara efisien dan efektif.

The Externalities-based Market Failure

Ketika perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaannya mereka dapat menjadi enggan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan strategi perusahaan di masa mendatang dalam kaitannya dengan kompetitor dan industri. Hal ini disebut juga sebagai fenomena *competitive disadvantages* (Foster, 1986). Jika perusahaan mengungkapkan banyak informasi maka hal itu dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk kepentingan mereka.

Tingkat eksternalitas yang positif dan tidak merugikan bagi perusahaan dapat dicapai jika ada aturan standar mengenai jenis *mandatory disclosure* yang perlu diungkapkan. Hal itu juga bermanfaat bagi investor karena mereka bisa membandingkan data dari berbagai perusahaan karena memang *comparable* dan dapat mengurangi biaya memperoleh informasi.

The Information Asymmetry-based Market Failure

Fenomena asimetri informasi selama ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Manajemen sebagai pihak yang tahu persis gambaran kinerja perusahaan mereka hanya memberikan sebagian informasinya kepada pihak luar. Masalahnya kecenderungan pihak manajemen untuk mengungkapkan hal-hal yang bagus saja kepada investor akan dapat menyesatkan investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Jika tidak ada pengaturan terhadap *mandatory disclosure* yang harus diungkapkan, maka perusahaan bisa memberikan informasi yang salah saji secara material dan berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan.

Praktek pengungkapan keuangan sangat beragam antar negara. Chow dan Wong-Boren (1987) serta Meek et al (1995) menyatakan bahwa di Meksiko informasi mengenai laba unit bisnis (*profit by lines of business*) adalah wajib diungkapkan (*mandatory*), tetapi di Swedia dan Perancis, informasi ini bersifat *voluntary*. Sebaliknya, di Swedia dan Perancis informasi tentang tanggungjawab sosial (*social responsibility*) perusahaan wajib diungkapkan, tetapi di Meksiko informasi tersebut masih bersifat sukarela. Perbedaan ini disebabkan peraturan tentang *disclosure* yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Di Indonesia, baik informasi mengenai laba unit bisnis dan *social*

responsibility keduanya belum merupakan informasi yang diwajibkan, tetapi masih bersifat *voluntary*.

Keragaman informasi yang disajikan dalam laporan baik yang bersifat mandatory maupun voluntary selain karena aturan juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik pasar, khususnya pasar modal antara negara maju dan negara yang masih berkembang. Penelitian Saudagaran dan Diga (1997) tentang karakteristik dan isu-isu kebijakan pelaporan keuangan antar berbagai pasar modal di negara maju dan berkembang menemukan hasil bahwa perbedaan tersebut didasari atas tiga kriteria yaitu ketersediaan informasi, keandalan, dan keterbandingan.

Kriteria pertama yaitu ketersediaan informasi (*availability of information*) menyangkut tingkat keluasan dan kualitas pengungkapan yang diperlukan untuk pembuatan keputusan investasi. Perbedaan dalam aspek ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan aturan antara negara maju dan negara berkembang. Kriteria kedua, keandalan menyangkut keandalan dari standar akuntansi yang digunakan serta kemampuan untuk memberlakukan standar tersebut secara efektif di negara yang bersangkutan. Sedangkan kriteria ketiga yaitu tingkat keterbandingan (*comparability*) berkaitan dengan sejauh mana laporan keuangan di satu negara dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di negara yang lain. Keterbandingan sendiri ditentukan oleh dua aspek. Pertama, perbedaan diantara standar-standar akuntansi domestik. Kedua, faktor-faktor lingkungan di masing-masing negara yang menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran angka-angka akuntansi.

Wallace et al (1994) di Spanyol, meneliti apakah perbedaan tingkat pengungkapan (*level of disclosure*) perusahaan dalam laporan tahunan mereka mencerminkan karakteristik perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berhubungan secara positif dan signifikan dengan karakteristik perusahaan yaitu besar perusahaan (*size*) tetapi justru berhubungan negatif dengan tingkat likuiditas perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik tidaklah menunjukkan hasil yang memuaskan tanpa adanya kekuatan regulasi untuk 'memaksa' mereka untuk melakukan keterbukaan informasi. Di Amerika Serikat SEC (Securities and Exchange Commission) menjadi badan yang mengeluarkan regulasi bagi perusahaan publik untuk selalu mengungkapkan informasi keuangan mereka. Dampak pengaturan pengungkapan oleh SEC kepada para perusahaan mengakibatkan konsekuensi pasar tertentu (Bushee dan Leuz, 2000). Pertama, pengungkapan yang dilakukan perusahaan berdampak signifikan terhadap market value dan likuiditas perdagangan saham emiten di bursa. Kedua, pengungkapan yang dilakukan membutuhkan banyak biaya meskipun ternyata benefit yang muncul melebihi biaya tersebut.

Di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang membahas mengenai disclosure. Susanto (1994), Subiyantoro (1997) dan Suropto (1998) meneliti keluasan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Temuannya mengindikasikan bahwa perusahaan yang berbasis asing ternyata memiliki tingkat voluntary disclosure yang lebih baik. Arifin (1998) melakukan penelitian tentang prinsip full disclosure dalam laporan keuangan perusahaan publik dengan kualitas informasi akuntansi (relevan, reliabel, dan komparabel). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip full disclosure dapat mendukung reliabilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan, namun tidak mendukung relevansi dan komparabilitas informasi akuntansi. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Arifin (2001) tentang tingkat kepentingan (*degree of importance*) dari informasi yang bersifat voluntary disclosure dari persepsi pemakai (*users*) dan penyaji (*preparers*) laporan keuangan perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakai laporan keuangan (*users*) menilai 24 item informasi voluntary disclosure memiliki derajat kepentingan yang tinggi, sedangkan penyaji atau manajemen perusahaan (*preparers*) menilai hanya sejumlah 12 item.

Menurut Bapepam (2002), dari hasil survey yang dilakukan BEJ kepada 55 pengguna laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik tahun 1997 yang diwakili oleh manajer investasi diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi.
- 2) Laporan keuangan belum sepenuhnya mengungkapkan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik secara transparan.

Hasil diatas mencerminkan perlunya penegakan aturan di Indonesia untuk lebih meningkatkan aspek keterbukaan informasi bagi para emiten dalam rangka melaksanakan prinsip full disclosure.

Secara umum, penelitian tentang praktek *disclosure* di Indonesia masih jarang dan masih dalam tahap awal sehingga perlu dikaji lebih jauh mengenai kuantitas pelaporan para emiten dan juga penyempurnaan terhadap aturan yang ada.. Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat menjadi rumusan konsep kebijakan tentang aturan informasi yang harus dimuat dalam laporan keuangan dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pada tahap awal dilakukan pemilihan sampel terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000, tahun dimana pengambilan data dilakukan untuk tahun pertama penelitian.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap yang telah diaudit dan dipublikasikan ke publik selama dua tahun terakhir sebelum dikeluarkannya aturan Surat Edaran BAPEPAM No.02/PM/2002. Menurut IAI, komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
3. Dilakukan pengambilan sampel secara proporsional pada tiap sektor industri untuk seluruh tiga belas sektor industri. Sampel yang diambil harus dapat mewakili industri tersebut. Untuk itu jumlah pengambilan sampel minimal 10% dari jumlah perusahaan dalam satu industri, kecuali jika dalam satu industri hanya terdapat lima perusahaan atau kurang maka akan diambil seluruhnya untuk industri yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pemilihan sampel dilakukan identifikasi item-item pengungkapan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah studi komparasi antara item-item yang tercantum didalam laporan keuangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dalam sebuah checklist.

Selanjutnya dari seluruh komponen informasi dalam laporan keuangan tahunan dibuat suatu model indeks pengungkapan laporan keuangan. Indeks dibuat untuk masing-masing industri. Menurut keputusan BAPEPAM terdapat total tiga belas industri dengan bentuk penyajian dan pengungkapannya masing-masing. Secara umum pengungkapan item tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu item yang harus diungkapkan untuk seluruh industri dan item yang harus diungkapkan khusus untuk industri tertentu.

Indeks pengungkapan laporan keuangan dihitung terlebih dahulu secara individual untuk masing-masing laporan yang ada di Laporan keuangan. Jadi terdapat lima jenis indeks pengungkapan untuk lima komponen laporan keuangan. Perhitungannya dilakukan melalui

rasio antara skor yang diberikan kepada perusahaan dengan laporan keuangannya (FS) dengan skor maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan (M). Indeks tersebut ditentukan dengan cara yang konsisten dengan penelitian sebelumnya (Cooke, 1989, Hossain et al., 1994, Sabeni, 2001). Perhitungan indeks pada penelitian ini menggunakan pendekatan *weighted approach*, yaitu dengan memberikan bobot tertimbang pada masing-masing item (Chow dan Wong-Boren, 1987). Beberapa langkah untuk menentukan indeks pengungkapan tiap perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap item-item pada setiap komponen laporan keuangan (FS) yang diungkapkan oleh perusahaan
2. Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap nilai maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (M) mengacu pada pedoman dari BAEPAM untuk tiga belas industri
3. Menghitung indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) secara individual untuk setiap komponen laporan keuangan
4. Menghitung indeks pengungkapan total (TDI) yang merupakan gabungan dari indeks setiap komponen laporan keuangan (DI)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2000 yang menyampaikan Laporan Keuangan. Menurut *JSX Statistik 2nd Quartet 2001*, perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2000 yang menyampaikan Laporan keuangan sebanyak 242 perusahaan.

Pemilihan sample dilakukan dengan cara *purposive* dengan kriteria sebagaimana disebutkan di muka. Sampel yang diambil harus dapat mewakili emitent dan pengambilan sampel minimal 10% dari jumlah perusahaan dalam satu industri, kecuali jika dalam satu industri hanya terdapat lima perusahaan atau kurang diambil seluruhnya untuk industri yang bersangkutan. Dari tahapan dan kriteria tersebut, diperoleh sample penelitian sebanyak 34 perusahaan dari 12 sektor.

Identifikasi Item-Item Pengungkapan

Tahap penelitian selanjutnya setelah jumlah sample dan perusahaan sebagai sample ditetapkan adalah mengidentifikasi item-item yang termasuk dalam pengungkapan semua komponen laporan keuangan yang diterbitkan untuk masing-masing perusahaan dalam kelompok industri. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Item-item ini, selanjutnya digunakan sebagai *checklist* pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel.

Indeks Pengungkapan Laporan Keuangan sebelum Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002 - Tahun 2000/2001

Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas kelima komponen laporan keuangan tersebut merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) sehingga bobot tertimbang untuk mengungkapkan setiap item diberi skor 1 (100%) dan skor 0 jika tidak mengungkapkan.

Indeks pengungkapan laporan keuangan dilakukan dengan langkah-langkah; pertama, tentukan nilai terhadap item-item pada setiap laporan keuangan (FS); kedua,

menentukan nilai terhadap maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (M); ketiga, menghitung indeks pengungkapan laporan keuangan secara individu untuk setiap komponen laporan keuangan (DI), keempat menghitung Penghitungan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI). Penghitungan dilakukan untuk periode sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, yaitu tahun 2000-2001 dan sesudah yaitu tahun 2003 dan 2004. Hasil perhitungan DI dan TDI untuk masing-masing perusahaan sample dan kelompok industri secara rinci dapat dilihat dalam lampiran indeks pengungkapan. Pada Tabel-1, berikut disajikan ringkasan indeks pengungkapan laporan keuangan secara individual (DI) dan indeks pengungkapan total (TDI) untuk 12 kelompok industri periode sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002:

Tabel-1 Indeks Pengungkapan Laporan Keuangan Individual (DI) dan Indeks Pengungkapan Total (TDI) per Kelompok Industri Periode Sebelum Terbitnya Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002

Kelompok	DI					TDI
	Neraca	Laba/Rugi	L.Perb.Ekts	Arus Kas	Catt ats LK	
Manufaktur	0.595	0.7714	0.6291667	0.4935897	0.2453047	2.7337986
Investasi	0.6915	0.89062	0.6428571	0.275	0.4855769	2.9859195
Jalan tol	0.489	0.917	0.5	0.604	0.207	2.716
Perhotelan	0.588	0.714	0.688	0.635	0.257	2.881
Restoran	0.536	0.643	0.695	0.58	0.268	2.652
Telekomunikasi	0.535	0.8333	0.8125	0.5576923	0.3056075	3.0729629
Konstruksi	0.5635	0.923	0.6875	0.52	0.2292453	2.923652
Perdagangan	0.66545	0.7381	0.75	0.474359	0.2496795	2.8153083
Transportasi	0.583	0.893	0.625	0.548	0.197	2.845
Real Estate	0.65333	0.8333	0.416667	0.474359	0.2125786	2.5900907
Peternakan	0.4	0.714	0.5	0.442	0.181	2.238
Perkebunan	0.489	0.75	0.6875	0.538	0.2532468	2.768981

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan DI komponen laporan neraca sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, diperoleh gambaran bahwa Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan neraca pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan HM Sampoerna dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 0.732, terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar 0.400. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0.6915 dan kelompok rendah adalah peternakan sebesar 0.400.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan rugi-laba pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan HM Sampoerna dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 1.000, terendah adalah PT Fast Food Indonesia dan PT BAT Indonesia dengan indeks pengungkapan (DI) yang sama besar, yaitu 0.643. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok konstruksi sebesar 0.923 dan kelompok dengan indeks rendah adalah restoran sebesar 0.643.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0.875 yang diperoleh empat perusahaan, yaitu PT Uniliver Indonesia Tbk, PT Unggul Indah Cahaya, Telkom, dan PT

Matahari Putra Prima. Terendah adalah PT Bukit Sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0.125. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh kelompok telekomunikasi sebesar 0.8125 dan kelompok dengan indeks rendah adalah real estate sebesar 0.4166667.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan arus kas pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0.640 diperoleh oleh PT Surya Semesta Internusa. Terendah adalah PT Bakre Brothers dengan indeks pengungkapan (DI) 0.200. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh kelompok perhotelan sebesar 0.635 dan kelompok dengan indeks rendah adalah investasi sebesar 0.275.

Seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0.596 diperoleh oleh PT Bimantara Citra. Terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) 0.181. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0.4855769 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan sebesar 0.181.

Indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 3.264 diperoleh oleh PT Astra International. Terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) sebesar 2.238. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh kelompok telekomunikasi sebesar 3.0729629 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan dengan indeks sebesar 2.238.

Indeks Pengungkapan Laporan keuangan Pasca Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002 - Tahun 2003/2004

Penghitungan indeks pengungkapan untuk periode pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, tahapannya sama dengan penghitungan indeks pengungkapan sebelum terbitnya peraturan tersebut. Hasil perhitungan DI dan TDI untuk masing-masing perusahaan sample dan kelompok industri, baik indeks pengungkapan laporan keuangan secara individual (DI) dan indeks pengungkapan total (TDI) untuk 12 kelompok industri pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel- 2 Indeks Pengungkapan Laporan Keuangan Individual (DI) dan Indeks Pengungkapan Total (TDI) per Kelompok Industri Periode Pasca Terbitnya Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002

Kelompok	DI					TDI
	Neraca	Laba/Rugi	L.Perb.Ekts	Arus Kas	Catt ats LK	
Manufaktur	0.683	0.893	0.846	0.633	0.2618638	3.3215763
Investasi	0.808	0.859	0.9285714	0.5	0.5576923	3.6537783
Jalan tol	0.544	0.958	0.75	0.688	0.219	3.159
Perhotelan	0.675	0.857	0.875	0.75	0.277	3.435
Restoran	0.667	0.821	0.875	0.78	0.278	3.421
Telekomunikasi	0.649	0.917	0.9375	0.712	0.3205608	3.535202
Konstruksi	0.67	0.942	0.875	0.7	0.2433962	3.4309167
Perdagangan	0.71	0.905	0.958	0.641	0.2657051	3.4801435
Transportasi	0.667	0.929	1	0.69	0.218	3.503
Real Estate	0.766	0.952	0.625	0.615	0.2286164	3.1871477
Peternakan	0.478	0.929	0.875	0.558	0.206	3.046
Perkebunan	0.42	0.964	0.875	0.673	0.2727273	3.4157717

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan DI komponen laporan neraca pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, diperoleh gambaran bahwa indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan neraca pada tahun pasca dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Ciputra Development, yaitu sebesar 0.851, terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar 0.478. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0.808 dan kelompok rendah adalah peternakan sebesar 0.478.

Seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan rugi-laba pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan Indosat dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 1.000, terendah adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar, yaitu 0.786. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok perkebunan sebesar 0.964 dan kelompok dengan indeks rendah adalah restoran sebesar 0.821.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 1.000 yang diperoleh tujuh perusahaan, yaitu PT Unggul Indah Cahaya, PT Tempo Scan Pacific, PT Bakrie Brothers, PT Telkom, PT Enseval Putra MT, PT Matahari Putra Prima dan PT Zebra Nusantara. Terendah adalah PTBukit Sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0.375. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh kelompok transportasi dengan indeks sebesar 1.000 dan kelompok dengan indeks rendah adalah real estate sebesar 0.625.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan arus kas pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0.840 diperoleh oleh PT Surya Semesta Internusa. Terendah adalah PT Alakasa Industrindo dengan indeks pengungkapan (DI) 0.423. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh kelompok restoran sebesar 0.78 dan kelompok dengan indeks rendah adalah investasi sebesar 0.5.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0.692 diperoleh oleh PT Bimantara Citra. Terendah adalah PT Bukit sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0.204. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0.55769 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan sebesar 0.206.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 3.788 diperoleh oleh PTBimantara Citra. Terendah adalah PT Alakasa Industrindo dengan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) sebesar 2.904. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 3.6537783 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan dengan indeks sebesar 3.046.

Perbedaan Indeks Pengungkapan Sebelum dan Pasca Aturan BAPEPAM No.2/PM/2002

Berdasarkan hasil perhitungan, secara umum menunjukkan bahwa indeks pengungkapan pasca terbitnya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002 lebih baik disbanding sebelum adanya aturan tersebut. Peningkatan kualitas indeks pengungkapan terjadi baik pada pengungkapan secara individual (DI) komponen laporan keuangan maupun secara total (TDI), seperti dapat kita lihat dalam Tabel-1 dan Tabel-2. Pada Subbab berikut akan diuraikan secara rinci perbedaan indeks pengungkapan sebelum dan pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002, serta hasil uji beda (*T-test*) untuk melihat apakah perbedaan sebelum dan sesudah aturan tersebut signifikan.

Indeks Pengungkapan Laporan Neraca

Indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan neraca sebelas kelompok industri mengalami kenaikan, kecuali kelompok perkebunan mengalami penurunan indeks sebesar 0.069, dimana sebelum aturan memiliki indeks pengungkapan sebesar 0.482 dan sesudah aturan turun menjadi 0.42. Dari sebelas kelompok tersebut, yang mengalami kenaikan indeks tertinggi kelompok restoran sebesar 0.131. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok jalan tol sebesar 0.055. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen neraca sebesar 0.0790181.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan neraca untuk semua emiten, bahwa emiten untuk semua kelompok industri semuanya mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan tertinggi diperoleh PT Ciputra Development dengan kenaikan 0.149, kenaikan terkecil diperoleh PT Sari Husada sebesar 0.049. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.095.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk laporan neraca, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan neraca adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0.5882 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0.6829. Dengan menggunakan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen neraca antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan neraca yang lebih baik.

Indeks Pengungkapan Laporan Komponen Laporan Rugi Laba

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sample mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan rugi laba. Tabel-1 dan Tabel-2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan rugi laba per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan rugi laba sebelas kelompok industri mengalami kenaikan, kecuali kelompok investasi mengalami penurunan indeks sebesar 0.03162 dimana sebelum aturan memiliki indeks pengungkapan sebesar 0.89062 dan sesudah aturan turun menjadi 0.859. Dari sebelas kelompok tersebut, yang mengalami kenaikan indeks tertinggi kelompok perdagangan sebesar 0.1669. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok transportasi sebesar

0.036. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen rugi laba sebesar 0.1087733.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan rugi laba untuk semua emiten, sebagian besar emiten mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Perusahaan yang mengalami indeks pengungkapan yang stabil dengan tingkat pengungkapan yang maksimal sebesar 1,000 adalah PT Astra Internasional dan PT Ciputra Development dengan indeks pengungkapan rugi laba sebelum dan sesudah sebesar 0.929. Perusahaan yang mengalami penurunan adalah PT Bimantara Citra dari 0.906 menjadi 0.875, dan PT Bakrie Brothers dari 0.875 menjadi 0.844. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen rugi laba tertinggi diperoleh PT Bakrieland Development dan PT Bakrie Sumaytra Plantation dengan kenaikan indeks yang sama sebesar 0.250, kenaikan terkecil diperoleh PT Zebra Nusantara sebesar 0.036. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.116.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk laporan rugi laba, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan rugi laba adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0.7929 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0.9087. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen rugi laba antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan rugi laba yang lebih baik

Indeks Pengungkapan Laporan Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sample mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas. Tabel-5.2 dan Tabel-5.3, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok transportasi dan peternakan dengan kenaikan indeks masing-masing sebesar 0.375. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok restoran sebesar 0.18. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan perubahan ekuitas sebesar 0.2321567.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Perusahaan yang mengalami indeks pengungkapan yang stabil adalah PT Uniliver Indonesia Tbk dengan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas sebelum dan sesudah sebesar 0.875. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh PT Tempo Scan Pacific, PT Zebra Nusantara, dan PT Cipendawa Agro Industri, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0.375.. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.220851.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk laporan perubahan ekuitas, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0.6334 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0.8544. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan perubahan ekuitas antara sebelum dengan sesudah

adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan perubahan ekuitas yang lebih baik.

Indeks Pengungkapan Laporan Komponen Laporan Arus Kas

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sample mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan arus kas. Tabel-1 dan Tabel-2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan.

Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan arus kas semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok investasi dengan kenaikan indeks sebesar 0.225. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok jalan tol sebesar 0.084. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan arus kas sebesar 0.1498333.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan arus kas untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh PT Bakrie Brothers dengan kenaikan sebesar 0.250.. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.148915.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk laporan arus kas, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan laporan arus kas adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0.4953 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0.6442. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan arus kas antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan arus kas yang lebih baik.

Indeks Pengungkapan Laporan Komponen Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 semua emiten yang menjadi sample mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan. Tabel-1 dan Tabel-2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok investasi dengan kenaikan indeks sebesar 0.0721154. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok restoran sebesar 0.01. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan sebesar 0.0214435.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh PT Bimantara Citra dengan kenaikan sebesar 0.096.. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.019861.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk laporan catatan atas laporan keuangan, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan

indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0.2566 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0.2766. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan catatan atas laporan keuangan antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan catatan atas laporan keuangan yang lebih baik.

Indeks Pengungkapan Komponen Total Laporan Keuangan

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 semua emiten yang menjadi sample mengalami kenaikan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI). Tabel-1 dan Tabel-2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan TDI per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok peternakan dengan kenaikan indeks sebesar 0.808. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok jalan tol sebesar 0.443. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen total laporan keuangan (TDI) sebesar 0.6138186.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen total laporan keuangan (TDI) untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh PT Tempo Scan Pacific dengan kenaikan sebesar 0.843.. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0.600077.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji T-Test untuk total laporan keuangan (TDI), menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 2.7665 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 3.3664. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen total laporan keuangan (TDI) antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi-laba, arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di muka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengungkapan atas laporan keuangan utama yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (100%), sehingga seharusnya tidak ada hal yang tidak diungkapkan atas komponen laporan keuangan utama tersebut.

2. Gambaran indeks pengungkapan sebelum keluarnya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002, berdasarkan hasil perhitungan indeks pengungkapan laporan keuangan emiten sample, baik secara individual laporan keuangan (DI) maupun secara total laporan keuangan (TDI), baik secara kelompok industri maupun perindividu perusahaan secara umum masih kurang dari indeks pengungkapan laporan utama yang bersifat wajib (indeks = 1).
3. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pengungkapan laporan keuangan emiten sample pasca aturan BAPEPAM No.02/PM/2002, baik secara individual laporan keuangan (DI) maupun secara total laporan keuangan (TDI), baik secara kelompok industri maupun perindividu perusahaan secara umum masih kurang dari indeks pengungkapan laporan utama yang bersifat wajib (indeks = 1).
4. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis uji-t atas indeks pengungkapan laporan keuangan sebelum dan sesudah aturan BAPEPAM No.02/PM/2002 baik secara individual maupun secara total terdapat perbedaan yang positif, dan signifikan.

Saran-saran

Bagi BAPEPAM :

1. Sanksi yang tegas perlu ditegakkan kepada emiten-emiten yang menyajikan laporan keuangan utama kurang memenuhi criteria pengungkapan yang lengkap. Jika sanksi tegas tidak ditegakkan, kualitas pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan oleh para emiten akan semakin jelek. Hal ini akan merugikan pengguna informasi keuangan.
2. Memberi penghargaan kepada emiten yang penyajian laporan keuangannya sudah memenuhi kriteri pengungkapan yang ada.
3. Perlu mengefektifkan lembaga pengawas yang ada untuk memantau tingkat pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan emiten.
4. Meninjau ulang tentang aturan dan kebijakan-kebijakan tentang kewajiban bagi emiten untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap.

Bagi IAI

1. IAI harus senantiasa melakukan evaluasi atas standar akuntansi yang sudah diterbitkan, apakah standar akuntansi yang ada mengandung *overload standards* atau tidak.
2. Sosialisasi standar yang sudah diterbitkan perlu dilakukan IAI, hal ini penting untuk mengeliminir adanya kebingungan pemakai standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal Bakrie, 2000, Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol 1, No. 2, Oktober-Desember.
- Arifin, 1998, *Prinsip Full-Disclosure Sebagai Pendukung Kualitas Informasi Akuntansi*. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, 2001, Consensus Between Users and Preparers on the Importance of Voluntary Disclosure Items in Annual Reports: An Indonesian Study. *Proceeding Asian Academy Management Conference*, Johor Bahru, Malaysia.
- Bainbridge, Stephen M., 1999. A Behavioral Economic Analysis of Mandatory Disclosure: A Thought Experiment Turned Cautionary Tale. Working Paper

- BAPEPAM. 2002. *Pedoman Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau perusahaan Publik di Indonesia*. SE-Ketua BAPEPAM No.02/PM/2002 Tanggal, 27 Desember 2002.
- Bushee, Brian J., dan C. Leuz. 2000. Economic Consequences of SEC Disclosure Regulation: Evidence from the OTCBB. Working paper.
- Chow, CW dan A. Wong-Boren, 1987, "Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation", *Accounting Review*, 62, July, pp.533-541.
- Cooke, T.E., 1989, "Disclosure in the Corporate Annual reports of Swedish Companies", *Accounting and Business Research*, 19, Spring, pp. 113-124.
- _____, 1992, "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations", *Accounting and Business Research*, 22, Summer, pp. 229-237.
- Firth, Michael. 1989. The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors on Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports. *Accounting and Business Research*. Autumn. Vol. 9. Hal. 276-280.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael Van Breda, 1992, *Accounting Theory*, fifth edition, Irwin-McGraw-Hill
- Herwidayatmo, 2000, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, *Majalah Usahawan*, Oktober, No.10/Th.XXIX
- Hossain, M. Tan, LM and Adams S 1994. Voluntary Disclosure in an Emerging Capital Market : Some Empirical Evidence from Companies Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. *The International Journal of Accounting*. Vol. 29. Hal. 334-351.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Meek, Gary K., Clare B. Roberts, Sydney J. Gray, 1995, "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By US, UK, and Continental European Multinational Corporations", *Journal of International Business Studies*, Third Quarter, pp. 555-572.
- Penmann, SH. 1988. "An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. Spring. Hal. 132-160.
- Saudagaran, Sakhrokh M., dan Diga, J.G., 1997, " Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues", *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Susanto, Djoko, 1994, *An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Disclosure in Annual reports of companies Listed on the Jakarta Stock Exchange*, Tim Koordinasi pengembangan Akuntansi, Jakarta
- Subiyantoro, E, 1997, Hubungan antara Tingkat Pengungkapan dengan Karakteristik Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi I*, Yogyakarta.
- Suripto, B. 1998. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela. *Simposium Nasional Akuntansi II*. Malang.
- Wallace, R.S., Olusegun, Kamal naser, dan Aracelu Mora, 1994, " The Relationship Between the Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in Spain", *Accounting and Business research*, Vol. 25, No. 97, pp. 41-53